

## ABSTRAK

Proyek jasa konstruksi menggunakan APBN/APBD sebagai sumber dana-nya, sehingga penggunaan APBN/APBD harus dipertanggungjawabkan pihak penyelenggara. Tindakan menyimpang dari pelaksanaan proyek konstruksi akan merugikan keuangan negara, sehingga diperlukan audit forensik untuk menilai kerugian yang menyebabkan kegagalan bangunan pada proyek konstruksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan menelaah tentang pelaksanaan pengaturan dan kelemahan-kelemahan *audit forensic* gagal bangunan, serta rekonstruksi pengaturan *audit forensic* gagal bangunan yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis sosiologis*, dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi belum berkeadilan karena belum adanya pengaturan yang khusus mengenai *audit forensic* gagal bangunan, dan selama ini dilakukan oleh BPKP yang berkompeten di bidang akuntansi dan *auditing*. Para ahli teknik sangat diperlukan untuk menyelidiki penyebab kegagalan bangunan; (2) Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan sebagai pembuktian kasus tindak pidana korupsi di pengadilan saat ini : (a) substansi hukum : terkait pengertian kegagalan bangunan, tidak ada sanksi pidana dan kesalahan hanya pada penyedia jasa; (b) struktur hukum : banyak pihak yang terlibat dan tidak terdapat lembaga *auditor forensic* independen, serta (c) kultur hukum : kurangnya integritas ahli; (3) Rekonstruksi pengaturan *audit forensic* gagal bangunan yang berbasis nilai keadilan dari segi : (a) substansi hukum : pengertian kegagalan konstruksi dari tahap perancangan hingga pengawasan pembangunan, pertanggungjawaban para pihak dan gagal bangunan yang disebabkan kelalaian pengguna jasa dan/atau penyedia jasa konstruksi; (b) kultur hukum : dibentuk lembaga *audit forensic* independen; serta (c) kultur hukum : peningkatan kualitas dan integritas SDM.

Kata kunci : Audit Forensic, Gagal Bangunan, Keadilan, Rekonstruksi

## ABSTRACT

Construction service projects use the APBN/APBD as the source of funds, so the use of the APBN/APBD must be held responsible by the organizers. Actions that deviate from the implementation of construction projects will be detrimental to the country's finances, so a forensic audit is needed to assess the losses that cause building failures in construction projects.

The purpose of this study is to find out, describe, analyze and examine the implementation of regulations and weaknesses of building failure forensic audits in proving corruption cases in the current court session, as well as the reconstruction of forensic audit failure arrangements based on fair values.

This research uses the constructivist paradigm. The method of approach used is sociological juridical, with descriptive research specification analysis. The data used are primary data and secondary data, which are then analyzed qualitatively.

The results of the study show that : (1) The implementation of forensic audit failures in buildings in proving cases of criminal acts of corruption has not been fair because there are no specific arrangements regarding forensic audits of failed buildings, and so far it has been carried out by BPKP who is competent in the field of accounting and auditing. Technical experts are urgently needed to investigate the causes of building failures; (2) Weaknesses that arise in the implementation of forensic audit failures in buildings as evidence of corruption cases in the current court : (a) legal substance : related to the understanding of building failures, there are no criminal sanctions and errors only on service providers; (b) legal structure : many parties are involved and there is no independent forensic auditor, and (c) legal culture : lack of expert integrity; (3) Re-construction of forensic audit arrangements for building failures based on fairness values in terms of : (a) legal substance : the definition of construction failures from the design stage to the construction supervision, accountability of the parties and building failures due to negligence of service users and/or providers of construction services; (b) legal culture : an independent forensic audit institution is formed; and (c) legal culture : improving the quality and integrity of human resources.

Keywords : Building Failure, Forensic Audit, Justice, Reconstruction